



PERAN DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION (DMO) DALAM  
PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG  
RINJANI (TNGR)

Oleh

Lalu Putrawandi Karjaya<sup>1</sup>, Kinanti Rizsa Sabilla<sup>2</sup>, Muhammad Sood<sup>3</sup>, Khairur Rizki<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: [Putrawandi@unram.ac.id](mailto:Putrawandi@unram.ac.id)

**Abstrak**

Pariwisata di Indonesia tidak hanya mencakup destinasi alam, tetapi juga wisata budaya, historis, religi, industrial, dan jenis lainnya. Pertumbuhan ini mendorong kebutuhan akan pengelolaan destinasi yang baik untuk memastikan kelangsungan dan integritas destinasi wisata. Di dalam konteks ini, DMO menjadi lembaga kunci yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi strategi bersama, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu destinasi yang menjadi sorotan adalah Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Pulau Lombok. Kawasan ini memiliki DMO yang unik, yaitu DMO Sembalun, yang dibentuk berdasarkan ide-ide masyarakat setempat. Keunikan ini memberikan DMO Sembalun peran yang berbeda dalam mendukung pembangunan serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di TNGR. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran Destination Management Organization (DMO) dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), khususnya Sembalun dengan fokus khusus pada DMO Sembalun. Seiring dengan pertumbuhan pesat sektor pariwisata yang telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, dampak destruktif terhadap lingkungan dan budaya mulai menjadi perhatian serius. Meskipun pariwisata telah berkembang pesat, terdapat tantangan terkait dengan pembangunan berkelanjutan, yang menuntut perhatian khusus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keindahan alam Sembalun sebagai bagian dari Kawasan TNGR di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menempatkannya sebagai destinasi wisata potensial, tetapi juga membuatnya rentan terhadap kehilangan keasliannya akibat pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali. Di sinilah konsep Sustainable Tourism menjadi landasan model pengembangan yang tepat untuk menanggapi tantangan ini. Analisis konten akan digunakan untuk mengevaluasi peran dan kontribusi DMO Sembalun, dengan fokus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran krusial DMO, terutama DMO Sembalun, dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Destination Management Organization Sembalun, Pariwisata Berkelanjutan, Taman Nasional Gunung Rinjani, Sembalun.

**PENDAHULUAN**

Dewasa ini, pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Didukung dengan keindahan alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang

menawarkan berbagai jenis destinasi wisata menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu menawarkan berbagai pengalaman kepada wisatawan. Dimana jenis destinasi yang ditawarkan saat ini tidak hanya



sebatas pada destinasi alam, melainkan telah tumbuh dan mencakup wisata budaya, historis, religi, industrial dan jenis wisata lainnya. Meski demikian, perkembangan dunia pariwisata yang bergerak dengan cepat turut mendorong jenis-jenis dan destinasi wisata tersebut untuk turut berkembang baik dalam memenuhi kebutuhan wisatawan maupun bersaing dengan destinasi wisata lainnya yang memiliki jenis wisata yang sama.

Hingga saat ini, perkembangan industry pariwisata di Indonesia telah berfokus pada pembangunan berkelanjutan guna menunjang pembangunan pariwisata dalam memberikan fokus pada isu dan pembangunan ekonomi, budaya hingga lingkungan. Angka kunjungan wisatawan yang menunjukkan peningkatan berdampak pada destruksi terhadap lingkungan yang bersifat alam maupun budaya. Selain itu, sektor pariwisata memiliki berbagai faktor yang saling berkaitan dengan organisasi kerjasama antar pelaku pariwisata di dalam satu wilayah atau satu destinasi tertentu. Berdasarkan Pechlaner, ini bukanlah fenomena baru, di mana pengembangan pariwisata secara konstan telah mencerminkan proses perubahan sosial, ekonomi bahkan ekologi. [1] Di dalam konteks yang lebih luas, destinasi wisata kerap kali diorganisir sebagai entitas pemasaran dan/ atau pengelola, yang turut secara langsung dihadapkan pada situasi perubahan yang bergerak dengan cepat dalam mencapai Pariwisata yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, selain dihadapkan pada perubahan yang cepat, sektor pariwisata di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang bermuara pada pengelolaan destinasi sendiri. Pengelolaan destinasi dan tata kelola memiliki peranan penting dalam pariwisata berkelanjutan agar perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dapat berjalan dengan baik. Di mana pengelolaan dan perencanaan pariwisata, termasuk kebijakan terkait serta tata kelola destinasi, sepenuhnya diawasi oleh pemerintah melalui lembaga Destination Management Organization (DMO).

[2] Salah satu destinasi wisata yang memiliki DMO dan saat ini menjadi sorotan, adalah Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengembangan wilayah kawasan TNGR menjadi sebuah perhatian, di mana dalam pelaksanaannya, daerah wisata alam TNGR cukup rentan untuk kehilangan keasriannya. Kedepannya hal ini turut menjadi sebuah tantangan dalam pengembangan destinasi wisata di TNGR. Model Pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai model pengembangan di destinasi TNGR.

Guna mencapai tujuan pengembangan pariwisata berkelanjutan di TNGR, tentu diperlukan pelibatan berbagai pihak, termasuk Destination Management Organization Sembalun (DMO Sembalun). Di mana pada dasarnya, DMO dibentuk oleh pemerintah pusat dan dilihat sebagai koordinator serta fasilitator strategi bersama, bertindak sebagai koalisi dari berbagai kepentingan yang berbeda untuk bekerjasama, memastikan kelangsungan hidup dan integritas destinasi saat ini hingga kedepannya. Meski demikian, terdapat eunikan tersendiri yang melatarbelakangi berdirinya DMO Sembalun. Di mana DMO Sembalun berdiri berawal dari ide-ide masyarakat di Kawasan TNGR dan Sembalun. Oleh karena itu, DMO Sembalun menjadi salah satu DMO yang memiliki perbedaan dengan DMO lainnya di Indonesia, di mana hal ini tentu akan mempengaruhi peranannya dalam menunjang pembangunan serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di TNGR.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang di atas adalah, 'bagaimana peranan Destination Management Organization Sembalun dalam Pengembangan Pariwisata di Wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR)?

Secara keilmuan, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu



pengetahuan dalam kajian pariwisata, penelitian ini juga secara praktis dibutuhkan dalam proses pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak pemangku kebijakan, NGO, maupun untuk pijakan penelitian lebih lanjutnya oleh lembaga-lembaga penelitian yang fokus di studi wisata berkelanjutan. Isu pariwisata juga tentunya memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembangunan, baik daerah maupun nasional.

### LANDASAN TEORI

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tinjauan literatur yang dapat membantu dalam melihat *Destination Management Organization* (DMO) dan *Sustainable Tourism*. Tulisan pertama oleh Angga Wijaya Holman Fasa, Mahardhika Berliandaldo, dan Dini Andriani dengan Judul **Implikasi Peran *Destination Management Organization* (DMO) – *Destination Governance* (DG) dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan** dalam Jurnal *Kepariwisata*, Vol. 21 No. 2 tahun 2022. Fasa dkk melakukan analisa pada implikasi DMO – DG dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang menaruh fokus di Indonesia, di mana beberapa destinasi wisata berbasis pariwisata berkelanjutan berada di Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Ujung Kulon, Sangeh Monkey Forest, Umbul Pongok dan Putri Kayu Palembang.[2] Ditegaskan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan memiliki kaitan yang erat dalam kontribusi *sustainable development goals* (SDGs), terutama pada tujuan ke 8, 12 dan 14. Meski demikian, yang menjadi fokus utama dalam karya ini adalah pengelolaan destinasi yang dinilai penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, di mana proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi harus terarah dengan baik.[2]

Tujuan dari karya ini yaitu untuk memberikan pemahaman pada DMO – DG dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan analisis VRIO. Adapun temuan dalam karya tersebut adalah kesuksesan

DMO tidak terlepas dari transformasi pengembangan DMO yang meliputi tahap Penguatan Gerakan Kesadaran kolektif pemangku kepentingan; Tahap Pengembangan Bisnis, dan Tahap Penguatan dan penataan Organisasi pengelolaan destinasi. Di mana kebijakan dan program DMO telah diimplementasikan sejak tahun 2009 hingga saat ini. Lebih lanjut, Fasa dkk juga menemukan bahwa terdapat 4 (empat) *Sustained Competitive Advantage* yang meliputi ekosistem kepariwisataan, kualitas pelayanan dan pengalaman berwisata, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan masyarakat.[2] Adapun temuan dalam literatur pertama ini dapat membantu penulis dalam menjelaskan konsep DMO serta komponen-komponen yang perlu dipenuhi dalam mencapai pariwisata yang berkelanjutan. Meski demikian, fokus pada variabel dependent berbeda pada penelitian ini, di mana Fasa dkk memfokuskan pada pariwisata berkelanjutan dalam cakupan kawasan yang luas, yaitu Indonesia, sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan variabel dependent-nya pada Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Literatur kedua merupakan karya João Estêvão, Maria João Carneiro, dan Leonor Teixeira, dengan judul **Destination Management Systems' Adoption and Management Model: Proposal of Framework** dalam *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce* Vol. 30 Issue 2, 2020. Estêvão, Carneiro, dan Teixeira menekankan bahwa perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sektor pariwisata yang menimbulkan pertanyaan yang relevan mengenai peran DMO dan cara paling tepat untuk mengimplementasikan serta mengelola platform *online* dengan menggunakan *Destination Management System* (DMS). Penelitiannya bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam literatur sebelumnya dalam



menganalisis faktor relevan untuk mengadopsi dan mengelola DMS. Pada hasil analisa, ditemukan bahwa penelitian tentang adopsi dan manajemen DMS masih jarang dilakukan, di mana sebagian besar konseptual dan sangat terfragmentasi yang biasanya sesuai dengan diskusi teoritis pada sekumpulan kecil permasalahan yang dihadapi DMO dan DMS secara spesifik.[3]

Penelitian ini memiliki fokus lokasi kajian DMO di Amerika dan Eropa yang menghasilkan analisis kerangka kerja yang mencakup model adopsi dan manajemen – termasuk alasan dan tantangan terkait adopsi DMS pada DMO. Lebih lanjut, karya tersebut memiliki hasil analisa dari perspektif praktis, di mana kerangka kerja yang diusulkan dapat digunakan oleh DMO dan pemangku kebijakan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan destinasi pariwisata, serta untuk memastikan keberhasilan penerapan dan pengelolaan DMS.[3] Oleh karena itu, temuan dalam literatur ini dapat membantu penulis dalam memahami manajemen secara praktis yang sekiranya dapat melihat peran DMO yang berada di Taman Nasional Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.

Literatur terakhir merupakan karya dari Urs Wagenseil, Melanie Wyss dan Lukas Huck, dengan judul **The Case of Sustainable Tourism Development in Alpine Destinations: Importance, Implementation and the Role of The Local DMO**, dalam *Tourism Planning and Development Journal* tahun 2022. Wagenseil, Wyss dan Huck menekankan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan adanya tindakan-tindakan yang terkoordinasi dan bersifat kolektif, di mana DMO dianggap sebagai salah satu aktor pemangku kepentingan yang penting. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengeksplorasi keadaan implementasi standar keberlanjutan dari destinasi yang tergolong dalam salah satu destinasi terkenal secara internasional dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC) di Alpine (Swiss,

Austria, Jerman dan Italia). DMO dijelaskan sebagai tokoh penting untuk menanamkan perubahan dalam layanan pariwisata lokal dalam menyediakan layanan pariwisata. Adapun peran aktor non- negara yang menekankan kekuatan negara dalam jaringan sosial semakin dipertimbangkan dalam pendekatan pluralistic terhadap pembuatan kebijakan yang tersirat.[4]

Lebih lanjut, penelitian tersebut menekankan pentingnya interaksi sektor public dan sektor swasta, di mana pemangku kebijakan kedua sektor bekerjasama dalam tata Kelola yang berfokus pada destinasi. Hal ini kemudian menjadi penting ketika mempertimbangkan pergeseran peran DMO dewasa ini dari pemasaran murni ke manajemen dan pengembangan tujuan strategis. Peran dan tanggung jawab mendasar dari DMO terkait pembangunan berkelanjutan terletak pada perencanaan strategis, perumusan serta implementasi kebijakan pariwisata destinasi, produk pariwisata serta pengembangan bisnis. Penelitian ini juga memeriksa pendekatan keberlanjutan masing-masing pemangku kepentingan dan mengidentifikasi kebutuhan yang jelas akan tindakan yang disinkronisasikan untuk mengatasi keterbatasan dalam keseluruhan konsep keberlanjutan yang beroperasi di area yang sama.[4] Adapun karya tersebut dapat membantu penulis dalam menjelaskan kethubungan antara DMO lokal dengan tercapainya pariwisata yang berkelanjutan dalam kerangka koordinasi dan kerjasama sektor public dan swasta. Meski demikian, perbedaan yang jelas terlihat dalam karya Wagenseil, Wyss dan Huck dan penelitian ini adalah luasnya *clustering area* yang ditetapkan.

#### **Konsep Destination Management Organization (DMO)**

Dewasa ini, kebijakan pengembangan pariwisata Indonesia tengah mengarah pada penguatan kapasitas kawasan melalui serangkaian program-program *Destination Management Organization* (DMO). Secara



garis besar, DMO dapat diartikan sebagai sebuah struktur tata Kelola destinasi pariwisata yang mencakup beberapa fungsi, diantaranya fungsi perencanaan, koordinasi, implementasi serta pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik.[5] DMO juga dapat diartikan sebagai organisasi yang memiliki fungsi pengelolaan berbagai otoritas, *stakeholders* pariwisata dan professional serta mampu untuk memfasilitasi kemitraan untuk meraih tujuan yang kolektif.[2] Lebih lanjut, struktur pengembangan tata Kelola pada DMO dapat berupa satu otoritas publik hingga kepada model kemitraan dengan konsep yang berupa perencanaan, koordinasi dan pengelolaan kegiatan tertentu pada sektor pariwisata.

Hal ini selaras dengan UNWTO yang menyatakan bahwa manajemen sebuah destinasi pariwisata terdiri dari manajemen terkoordinasi dari keseluruhan elemen yang membentuk sebuah tujuan wisata yang memerlukan banyak koalisi dan kerjasama dari berbagai organisasi, baik dari pemerintah maupun swasta. [6] Berdasarkan UNWTO, sebuah DMO memiliki wewenang yang lebih luas untuk menjadi pemimpin strategis dalam pengembangan destinasi.[6] UNWTO selanjutnya telah mengidentifikasi bidang kinerja utama dalam manajemen destinasi di tingkat DMO, diantaranya adalah (1) Kepemimpinan Strategis; (2) Implementasi Efektif; dan (3) Tata Kelola yang Efisien.[6]

Berdasarkan Putera, Mulatsih dan Rahayu, DMO memiliki beberapa kategori, *pertama, National Tourism Authorities or Organizations*, yang bertanggung jawab atas manajemen dan pemasaran pariwisata di tingkat nasional; *kedua, Regional, Provincial or State DMOs*, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan/ atau pemasaran pariwisata di wilayah geografis yang ditentukan untuk tujuan tersebut, meskipun tidak selalu wilayah administrative maupun pemerintah lokal seperti kabupaten, negara bagian maupun provinsi; *ketiga, Local DMOs*, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan/ atau wilayah pemasaran

pariwisata berdasarkan wilayah geografis atau kota/kabupaten yang lebih kecil.[7] Lebih lanjut, mereka juga mengklasifikasikan fungsi DMO tersebut menjadi kelengkapan sebuah sistem, diantaranya:[7]

- a. *Economic Driver*, sebagai sistem yang menghasilkan pendapatan daerah, lapangan pekerjaan serta penghasilan pajak yang berkontribusi pada pembangunan daerah;
- b. *Community Marketer*, sebagai sistem yang menggambarkan tujuan wisata, kegiatan hingga destinasi pariwisata;
- c. *Industry Coordinator*, sebagai kejelasan fokus pengembangan dan pertumbuhan industri yang menghasilkan keuntungan dari pariwisata;
- d. *Quasi-Public*, sebagai peningkatan kualitas hidup.

DMO muncul sebagai pemain kunci dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, di mana keberhasilan kinerja DMO ditentukan oleh kapasitasnya untuk mendapatkan kredibilitas serta kepercayaan dari seuruh pemangku kepentingan.[2] Oleh karena dalam DMO terdapat komponen penting, diantaranya *coordination tourism stakeholders, destination crisis management, dan destination marketing*. Pada *coordination tourism stakeholders*, komponen ini menjadi salah satu kunci utama yang disebabkan pada titik berat hubungan jejaring yang membentuk sistem DMO. Selanjutnya *Destination Crisis Management*, di mana komponen ini memberikan pengawasan dari sistem dengan pelaksanaan serta pengelolaan implementasi pada program. Menurut Putera, Mulatsih dan Rahayu, komponen kedua ini turut terbentuk atas 6 (enam) elemen lainnya, antara lain: *stewardship management, finance assistance and access venturecapital, visitor management, information/ research, serta human resources development*. [7] Adapun tujuan dari *stewardship management* merupakan adopsi nilai-nilai yang bersifat positif dari sistem DMO yang telah diterapkan di beberapa tempat. Lebih lanjut *finance assistance and*



*access venture capital* memiliki peran untuk mendapatkan potensi investasi yang berupaya membantu sektor swasta dalam membentuk sumber modal dan promosi pariwisata. Sedangkan *visitor management* menjadi salah satu komponen penting dalam pasokan produk jasa terhadap pengunjung. *Information/research* diperlukan dalam mendukung keputusan dan tindakan yang dilakukan dari setiap kegiatan. Sedangkan yang terakhir adalah pengembangan *human resources* yang berguna untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di bidang pariwisata.

**Destination Marketing** pada akhirnya menjadi ujung tombak dalam komponen DMO. Adapun keberhasilan DMO ditentukan dari bagaimana *destination marketing* mampu untuk menarik pengunjung untuk datang ke destinasi maupun wilayah yang dipromosikan. Pada bagian ini terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi *destination marketing*, diantaranya adalah *general publicity, advertising product/services, advertising product/services with price information, e-mail enquiry, e-mail booking, online payment, registration with ID*, dan lain sebagainya.[7]

### Konsep Sustainable Tourism

*Sustainable tourism concept* atau konsep pariwisata berkelanjutan mengacu kepada pembangunan berkelanjutan, di mana konsep ini menekankan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat rasional. Konsep ini sendiri telah muncul dikarenakan untuk mengurangi konsekuensi dari pariwisata massal dalam 4 dekade terakhir.[8] Hal ini kemudian sejalan dengan Laporan Sekretaris Jenderal PBB terkait dibutuhkannya perubahan konsep umum pembangunan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang jelas. Hal ini kemudian diikuti oleh pemikiran Krippendorf dan Ceballos-Lascurain yang mengembangkan konsep pariwisata alternatif, berupa *eco-tourism, green tourism, soft tourism, nature tourism, environmental tourism, responsible tourism, discreet tourism, appropriate tourism* dan *eco-ethnotourism*.[9]

Model pariwisata ini kemudian dirancang melalui pendekatan evaluasi yang menyandingkan bentuk-bentuk baru pariwisata melalui model pariwisata massal yang lama.

Lebih lanjut, *United Nations World Tourism Organizations* (UNWTO) mendefinisikan *sustainable tourism* sebagai sebuah kegiatan yang memiliki fokus yang beragam dan tidak terpatok pada kegiatan pariwisata semata. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut mempengaruhi sektor lainnya, diantaranya adalah sektor ekonomi, sosial hingga lingkungan. Terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam melihat *sustainable tourism, pertama*, Kualitas – di mana penawaran kualitas yang baik kepada pengunjung dapat meningkatkan kualitas hidup para penyedia jasa wisata serta menjamin terjaganya kualitas lingkungan destinasi pariwisata tersebut; *kedua*, kontinuitas/kesinambungan – pariwisata berkelanjutan menjamin keberlangsungan hidup sumber daya alam yang digunakan serta menjamin tetap terjaganya kelestarian budaya yang berada di daerah tersebut hingga memberikan pengalaman kepada pengunjung; *ketiga*, keseimbangan – *sustainable tourism* memastikan kebutuhan sektor pariwisata, tujuan para penggerak lingkungan serta kebutuhan masyarakat lokal agar tetap seimbang, sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam kegiatan pariwisata yang dilakukan.[10]

*Sustainable tourism* menitikberatkan pada adanya unsur berkelanjutan dalam pengembangan industry pariwisata yang kedepannya akan bertujuan mengurangi adanya dampak negative pada perkembangan pariwisata. Selain itu, konsep ini menitikberatkan pula pada pengembangan industry pariwisata yang berkelanjutan yang turut serta melibatkan masyarakat lokal untuk mencapai tujuan bersama atau kesejahteraan lokal.[11] Meski demikian, makna ‘berkelanjutan’ dalam hal ini tidak hanya terbatas pada pembahasan isu-isu lingkungan semata, melainkan



mempertimbangkan ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan hingga etika.[11] Adapun prinsip-prinsip dalam pariwisata berkelanjutan sebagai berikut:

- a. **Partisipasi** – masyarakat turut serta dalam proses pengawasan dan control pada pembangunan pariwisata dengan terlibat dalam penentuan visi pariwisata, identifikasi sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkakan, serta pengembangan tujuan dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Selain itu, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam implementasi strategi yang telah disusun sebelumnya.
- b. **Keikutsertaan Para Pelaku** – para pelaku atau *stakeholders* yang terlibat dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LS), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, bisnis dan pihak lain yang sekiranya dapat memberikan pengaruh dan memiliki kepentingan yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.
- c. **Kepemilikan Lokal** – fasilitas penunjang kepariwisataan seperti akomodasi, tempat makan dan lain sebagainya seharusnya dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi masyarakat setempat.
- d. **Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan** – hal ini diartikan sebagai pengurangan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Di mana penggunaan sumber daya ini didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Pada pelaksanaan kedepannya, kegiatan pariwisata harus dapat menjamin bahwa sumber daya alam maupun buatan

dapat dipelihara dan diperbaiki dengan penggunaan kriteria serta standar internasional.

- e. **Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat** – tujuan yang dimaksudkan adalah tujuan yang dapat mewadahi kegiatan pariwisata, sehingga kondisi harmonis antara wisatawan, masyarakat dan destinasi dapat terwujud.
- f. **Daya Dukung** – adapun daya dukung yang dimaksudkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus disesuaikan serta serasi dengan batas-batas lokal maupun lingkungan. Rencana dan implementasi operasi harus dievaluasi secara regular. Hal ini akan mendukung adanya penyesuaian maupun perbaikan yang sekiranya akan dibutuhkan. Selain itu, skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).
- g. **Monitor dan Evaluasi** – kegiatan ini mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator dan batasan untuk mengukur dampak pariwisata yang memiliki skala nasional, regional dan lokal.
- h. **Akuntabilitas** – perencanaan pariwisata hendaknya memberikan perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan Kesehatan masyarakat lokal yang dapat terlihat dalam kebijakan pembangunan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.
- i. **Pelatihan** – pada prinsip ini, pembangunan pariwisata berkelanjutan tentunya membutuhkan pelaksanaan berbagai program, dan pelatihan untuk membekali masyarakat dalam peningkatan pengetahuan maupun keterampilan, seperti keterampilan bisnis, *vocational* dan *professional*.



j. **Promosi** – prinsip terkahir meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *landscape, sense of place*, serta identitas masyarakat setempat.

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk mampu menjawab rumusan masalah penelitian ini dengan berdasarkan pada sejumlah indikator dan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus analisis komperhensif. Menurut Yin, Studi Kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.[12] Tujuannya adalah untuk menafsirkan peristiwa, yaitu, untuk memahami bagaimana aktor memahami masalah dan mengapa mereka melakukan begitu. Menurut pendekatan ini, pemahaman dan interpretasi berasal dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti.[13]

Peneliti menggunakan metode wawancara struktur mendalam (*indepth interview*). Interaksi penulis dengan bidang penelitian dilakukan dari April 2023 hingga Agustus 2023 dan termasuk proses wawancara mendalam, analisis dokumen, kelompok fokus, dan observasi. Pertama dan mengenai wawancara mendalam, responden dipilih melalui purposive sampling. Kami mewawancarai beberapa stakeholder serta melakukan FGD dengan beberapa kelompok Usaha di sekitar TNGR, untuk mengetahui bagaimana peran DMO dapat menunjang tercapainya pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, penulis menganalisis dokumen-

dokumen publik mengenai peran DMO baik ditingkat nasional maupun lokal dan sustainable tourism dalam pengembangan industri pariwisata. Selain itu, penulis juga menganalisis dokumen personal yang mungkin dimiliki oleh narasumber yang dapat menjadi bahan analisis yang relevan. Terakhir penulis akan mencoba menggali data dengan Focus Group Discussion dengan pihak DMO maupun NGO yang bergerak dalam isu pengembangan destinasi pariwisata, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai realisasi peranan DMO dalam pengelolaan destinasi pariwisata untuk menunjang pariwisata berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data, sedangkan alat pengumpulan data atau instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data. Wawancara adalah metode tetapi pedoman wawancara adalah alat/instrumen. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data harus dilakukan pada situasi yang bersifat *natural setting* (kondisi ilmiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipatoris (*participatory observation*), wawancara mendalam (*depth interview*), serta dokumentasi.

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, antara lain, yaitu: *pertama*, metode observasi: yaitu: metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan memperhatikan objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung serta mengadakan pencatatan tentang hasil pengamatan tersebut secara sistematis. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai observer partisipasi dengan melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan individu atau kelompok. *Kedua*, metode wawancara; yaitu: pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,





sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin meneliti studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mengintepretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. *Ketiga*, metode dokumentasi; yaitu: merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Destination Management Organization di Indonesia dan Pariwisata Berkelanjutan*

Di Tengah persaingan global dewasa ini, daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam memperkuat dan mengembangkan daya saing, termasuk bidang pariwisata. Pendekatan yang bersifat konvensional berupa pendekatan *top-down* telah dinilai tidak lagi dapat mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks. Oleh karena itu, selama beberapa dekade terakhir pendekatan *collaborative governance* semakin populer di kancah internasional, termasuk dalam sektor pariwisata. Di Indonesia, contoh penerapan pendekatan ini dapat dilihat pada penggunaan DMO (*Destination Management Organization*). Di mana sesuai dengan konsepnya, DMO menjadi sebuah entitas organisasi terdepan yang mencakup otoritas, pemangku kepentingan, para profesional serta mampu memfasilitasi kemitraan menuju visi dan misi destinasi secara kolektif. Adapun struktur tata kelola *Destination Management Organization (DMO)* beragam, mulai dari otoritas pemerintah pusat hingga kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Fungsi DMO juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan potensial, serta tingkat desentralisasi administrasi publik, mencakup tingkatan nasional, regional, hingga local.[14] Pengelolaan destinasi dan tata kelola

destinasi memiliki peran krusial dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, di mana proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi dapat dilakukan secara terarah dan efektif.[2]

Lebih lanjut, di Indonesia, DMO diarahkan pada fungsi sebagai penggerak ekonomi local, pemasaran, coordinator industry, lembaga yang mewakili pengelola serta membangun nilai unik tertentu pada komunitas lokal. Di mana hal ini selaras dengan pengembangan tata Kelola destinasi pariwisata di Indonesia yang berdasar pada prinsip dan konsep partisipatif, sistematis, kolaboratif, berkelanjutan serta manajerial dengan proses yang terukur.[2] Adapun program DMO ini telag disahkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 35/UM.001/MPEK/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.[15] Oleh karena itu, di dalam publikasi mengenai Pembentukan dan Pengembangan *Destination Management Organization (DMO)* yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (yang kini dikenal sebagai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), DMO didefinisikan sebagai suatu sistem pengelolaan destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis. Sistem ini meliputi fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematis dengan memanfaatkan jejaring, informasi, dan teknologi. Pengelolaan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat, pelaku atau asosiasi, industri, akademisi, serta pemerintah yang memiliki tujuan, proses, dan kepentingan bersama. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi, jumlah kunjungan wisata, lama tinggal, dan pengeluaran wisatawan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.[14] Biro Konvensi dan Biro Pariwisata juga termasuk dalam bagian dari *Destination Management Organization (DMO)*. Namun, kedua biro ini memiliki wewenang yang



terbatas, dengan fokus utama pada promosi destinasi pariwisata. Selain itu, dalam mengaplikasikan konsep-konsep pengembangan yang berkelanjutan melalui DMO, terdapat pembagian tiga skala yang meliputi skala lokal, nasional dan regional. Di mana DMO versi kemenbudpar (saat ini kemenparekraf) turut menerapkan prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif dan berkelanjutan, di mana hal ini selaras dengan DMO UNWTO.

Menurut Alastair Morrison dalam Konferensi Nasional DMO yang diselenggarakan di Jakarta pada Agustus 2010, panduan DMO mencakup tahapan mulai dari pengembangan produk, pemasaran, riset, komunikasi, hubungan dengan komunitas, pengembangan sumber daya, hingga tahap pengelolaan dan pelaporan. Pada kesempatan yang sama, Cesar Castaneda menambahkan bahwa DMO memiliki potensi untuk menciptakan atau memperkuat keunggulan kompetitif, menjamin keberlanjutan pariwisata, memperluas manfaat ekonomi dari pariwisata, meningkatkan pendapatan, dan membangun identitas *brand*. [14] Selain itu, DMO diakui sebagai suatu lembaga yang bersifat institusi sosial dan tidak sepenuhnya berubah menjadi organisasi formal. Oleh karena itu, keberhasilan DMO sangat bergantung pada peran para aktor yang menerapkan nilai, norma, keyakinan, serta tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa DMO memiliki tanggung jawab dalam membentuk destinasi pariwisata dengan tujuan mencapai pengembalian investasi yang optimal, pertumbuhan pasar, peningkatan kualitas produk, diversifikasi merek, serta keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, DMO juga berperan dalam kepemimpinan dan koordinasi, perencanaan dan penelitian, pengembangan produk, pemasaran dan promosi, kemitraan, penguatan sumber daya manusia, serta hubungan dengan masyarakat lokal. [14] Adapun aktivitas DMO dibagi menjadi dua fungsi signifikan, antara lain: [14]

- a. Eksternal Destination Marketing (EDM) : Meliputi pemasaran melalui situs web, acara, konferensi dan festival, program kerjasama, surat langsung, pameran penjualan, pameran dagang, periklanan, perjalanan pengenalan, publikasi, dan brosur.
- b. Internal Destination Development (IDD) : Mencakup manajemen kunjungan, penelitian atau informasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan pariwisata, manajemen krisis, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan dan modal usaha, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kualitas pengalaman pengunjung.

Di Indonesia, DMO digunakan sebagai alat strategis dan manajemen dalam upaya meningkatkan kualitas destinasi pariwisata. Kebijakan dan program DMO telah diterapkan pada periode 2009 hingga 2014 dengan peran sebagai katalisator untuk merumuskan dan menetapkan tujuan, proses, serta kepentingan bersama yang disesuaikan dengan kearifan lokal setiap daerah DMO. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menyusun pedoman untuk pembentukan dan pengembangan DMO, yang kini menjadi panduan umum bagi pemerintah pusat dan daerah, pengelola destinasi pariwisata, serta para pengambil kebijakan.. Di dalam pengembangan DMO, terdapat 4 prinsip, antara lain: [14]

- a. Prinsip Partisipatif  
Prinsip partisipatif melibatkan keterlibatan aktif masyarakat lokal secara luas bersama dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengambilan keputusan terkait pembentukan dan pengelolaan DMO.
- b. Prinsip Keterpaduan  
DMO merupakan sistem pengelolaan pariwisata yang terpadu, mengintegrasikan fungsi ekonomi, pemasaran, koordinasi,



pembentukan identitas masyarakat, serta fungsi representatif. Prinsip keterpaduan diwujudkan melalui pengelolaan pariwisata yang direncanakan secara menyeluruh, dengan memperhatikan ekosistem di wilayah pariwisata dan disinergikan dengan pembangunan di berbagai sektor. Pengembangan pariwisata harus diselaraskan dengan dinamika sosial budaya masyarakat setempat, dinamika ekologi di wilayah pariwisata tersebut dan sekitarnya, serta disesuaikan dengan kerangka dan rencana pembangunan daerah.

c. Prinsip Kolaboratif

Prinsip ini diwujudkan melalui kerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan konflik serta mengakomodasi berbagai aspirasi atau keinginan dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai peran, manfaat, dan tanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata. Prinsip kolaboratif bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan pariwisata.

d. Prinsip Berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip: layak secara ekonomi (economically feasible), lingkungan (environmentally viable), sosial (socially acceptable) dan tepat guna secara teknologi (technologically appropriate). Dengan demikian, pengelolaan destinasi dapat dilakukan lebih efektif, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menggabungkan profit dan pembangunan ekonomi secara umum, sambil menjaga identitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Di Indonesia, pengembangan DMO (Destination Management Organization) dilaksanakan melalui strategi perencanaan yang

disusun secara strategis dan diterapkan dalam berbagai program di lokasi-lokasi yang dipilih secara selektif. Beberapa strategi kunci dalam pengembangan DMO adalah sebagai berikut:[14]

a. Koordinasi

Karena pembangunan pariwisata bersifat multisektoral dan multidimensi, destinasi wisata yang ideal harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam bentuk organisasi-organisasi yang saling melengkapi. Koordinasi yang efektif antara berbagai organisasi ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan pariwisata terintegrasi dengan baik.

b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Di setiap daerah terdapat berbagai institusi dan organisasi yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pengembangan pariwisata. Biasanya, pemangku kepentingan ini berada dalam sistem yang terfragmentasi. Oleh karena itu, integrasi dan kerjasama yang erat antara pemangku kepentingan diperlukan untuk membentuk DMO yang efektif dan sinergis.

c. Kemitraan

Pengembangan DMO memerlukan adanya kepemimpinan dari setiap pihak yang memungkinkan terjalinnya kemitraan di antara pemangku kepentingan. Kemitraan ini penting untuk membangun kerjasama yang harmonis dan produktif dalam pengelolaan destinasi.

d. Kepentingan dan Tujuan Bersama

Pengembangan DMO harus didasarkan pada kepentingan dan tujuan bersama. Meskipun pemangku kepentingan memiliki berbagai kepentingan, penting bagi pelaku DMO untuk mengakomodasi keragaman tersebut. Kepentingan dari individu maupun kelompok individu menjadi komponen tujuan yang harus disatukan dalam mencapai tujuan bersama.

e. Pencapaian Indikator dan Kinerja



Dalam pengembangan DMO, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan merupakan hal yang krusial. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dari rencana awal dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Penetapan indikator kinerja, yang mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, merupakan bagian penting dari proses evaluasi ini.

Berdasarkan strategi tersebut, diperlukan indikator-indikator kunci yang terkait dengan tata kelola destinasi pariwisata di Indonesia. Indikator ini mencakup organisasi, ekosistem kepariwisataan, pemasaran, kualitas pelayanan dan pengalaman berwisata, penelitian dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, sumber dana, pengelolaan pengunjung, pengelolaan berkelanjutan, pengelolaan krisis, pengelolaan masyarakat, kontribusi lingkungan, kontribusi ekonomi, kualitas konten lokal, serta dukungan dari pemangku kepentingan dan lembaga terkait.[2] Lebih lanjut, dalam perkembangannya di Indonesia, program DMO berorientasi pada faktor-faktor kunci keberhasilan, yaitu manajemen destinasi dan inovasi. Konsep pengembangan DMO dalam sektor pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa sektor ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pengelola, wisatawan, masyarakat, dan berbagai pihak lain di dalam sebuah destinasi wisata.[2]

Hal ini kemudian menjadikan DMO sebagai sebuah entitas yang memegang peranan kunci dalam pengelolaan destinasi wisata di suatu daerah. Di mana DMO pada akhirnya memiliki mandat dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan ini mencakup keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan budaya lokal. Dalam konteks Indonesia, peran DMO sangat vital mengingat keanekaragaman dan kekayaan destinasi wisata

yang membutuhkan pengelolaan yang cermat agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan nilai-nilai lingkungan dan budaya. DMO bertindak sebagai katalisator yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam industri pariwisata, termasuk pemerintah, komunitas lokal, pelaku industri, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi yang diperlukan guna mengembangkan destinasi secara efektif dan berkelanjutan. DMO memfasilitasi pertemuan dan dialog antara berbagai pihak untuk menyusun strategi pengelolaan destinasi yang komprehensif dan inklusif, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta budaya lokal.

Selanjutnya, di dalam menjalankan fungsinya, DMO menggunakan pendekatan yang terstruktur yang mencakup beberapa tahap di dalamnya, seperti penyadaran kolektif, pembentukan kelembagaan, penguatan jejaring, dan pengembangan bisnis. Pada tahap penyadaran kolektif, DMO berupaya merangkul semua pihak terkait untuk memahami potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan destinasi. Tahap ini penting untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan destinasi. Dengan kesadaran kolektif ini, para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, DMO juga dapat menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi secara lebih efektif. Salah satu contohnya adalah pembentukan *Local Working Group* (LWG), menjadi sebuah langkah strategis untuk memberdayakan komunitas lokal dalam pengelolaan destinasi wisata. Kelembagaan ini memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak, sehingga program-program pengelolaan destinasi dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Hubungan antara DMO dan pariwisata berkelanjutan juga memiliki peranan yang dipegang oleh DMO



dalam penguatan jejaring (*networking*) dengan berbagai organisasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Di mana melalui *networking* tersebut DMO dapat menarik investasi dan dukungan teknis yang diperlukan untuk mengembangkan destinasi wisata tanpa merusak nilai-nilai yang ada.

Lebih lanjut, dampak penerapan DMO pada pariwisata berkelanjutan dapat dikatakan cukup signifikan. Melalui pendekatan yang terstruktur, DMO membantu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing destinasi tersebut di pasar global. Selain itu, DMO juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui integrasi komunitas lokal dalam pengelolaan destinasi, DMO memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan dukungan lokal terhadap upaya pelestarian lingkungan dan budaya, karena masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelangsungan destinasi.

Namun, penerapan DMO juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal menyatukan berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan yang berbeda. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, di mana semua pihak diajak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, DMO harus terus berinovasi dalam menciptakan mekanisme kolaborasi yang efektif, agar pengelolaan destinasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, DMO berperan penting dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan budaya.

#### **Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR)**

Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) merupakan salah satu Kawasan konservasi alam yang terletak di Pulau

Lombok, Nusa Tenggara Barat. TNGR diresmikan sebagai taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 298/Menhut-II/2005 dengan luas 41.330 hektar.[16] Kawasan TNGR sendiri terletak di Pulau Lombok yang secara geografis berada di antara 116°21'30" - 116°34'15" BT dan 8°18'18" - 8°32'19" LS.[16] Kawasan ini merupakan sebuah daerah bergunung-gunung dengan ketinggian 500 – 3726 mdpl. Pada awal pendiriannya, TNGR memiliki peran penting dalam melestarikan ekosistem alamiah, yang mencakup flora, fauna, dan kekayaan geologisnya, termasuk gunung berapi aktif yang menjadi ikon taman ini, yaitu Gunung Rinjani. Sejarah TNGR tidak lepas dari dinamika geologis dan sejarah pengelolaan kawasan. Awalnya, kawasan ini merupakan Suaka Margasatwa yang ditetapkan pada tahun 1941 oleh Gubernur Hindia Belanda. Kawasan ini memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan, dengan puncak tertinggi adalah Gunung Rinjani yang mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut, menjadikannya gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia.[17] TNGR didirikan sebagai taman nasional pada tahun 1997. Sebelum itu, kawasan ini awalnya ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1941, dan kemudian diresmikan sebagai taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 23 Mei 1997 melalui Surat Keputusan No. 280/Kpts-IV/1997.[17] Penetapan TNGR bertujuan untuk melindungi ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, serta sebagai kawasan konservasi sumber daya alam yang sangat penting.

Lebih lanjut, saat ini TNGR terletak di tiga kabupaten berbeda, yaitu Kabupaten Lombok Utara (30%), Kabupaten Lombok Tengah (17%) dan Kabupaten Lombok Timur (53%).[18] Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Taman Nasional Gunung Rinjani di bagi menjadi 2 (dua) wilayah pengelolaan, antara lain:[16]

- a. Seksi Koservasi Wilayah I Lombok Utara. Di mana wilayah ini menangani wilayah Taman Nasional yang terletak di bagian Kabupaten Lombok Utara. Bagian ini merupakan 30% dari seluruh Kawasan taman nasional yang seluas  $\pm 12.357,67$  Ha.
- b. Seksi Konservasi Wilayah II Lombok Timur. Di mana bagian ini menangani wilayah taman nasional yang berada di Kabupaten Lombok kTimur dengan luas  $\pm 22.152,88$  Ha.

Selain itu, Kawasan TNGR dibagi menjadi beberapa zonasi Kawasan, sesuai dengan SK Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. 243/KSDAE/SET/KAS.0/6/2017 tentang Penataan Zona pada Taman Nasional Gunung Rinjani.[16] Adapun zonasi Kawasan ini digunakan sebagai strategi pengelolaan Taman Nasional, yang terdiri dari Zona Inti (17.110,18 Ha), Zona Rimba (10.603,18 Ha), Zona Pemanfaatan (10.563,77 Ha), Zona Rehabilitasi (1.062,93 Ha), Zona Tradisional (1.760,09 Ha), Zona Khusus (184,06 Ha), dan Zona Religi (45,80 Ha).[16] Oleh karena itu, berdasarkan pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, TNGR memiliki fungsi pokok berupa (a) perlindungan system penyangga kehidupan; (b) Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; (c) Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.[19] Fungsi pokok tersebut ditetapkan mengingat TNGR memiliki keanekaragaman flora yang sangat tinggi, engan berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan tropis dataran rendah hingga sub-alpin.[17] Selain itu, Kawasan TNGR juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam utama di Indonesia, terutama untuk kegiatan

pendakian dan trekking. Jalur trekking yang paling populer dimulai dari Senaru dan Sembalun Lawang, dengan jalur pendakian yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara.[20]

Pada pengelolaan, Kawasan TNGR melibatkan kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Di mana Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki tugas pokok yang berupa “Melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dalam rangka konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. [19] Di mana dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki beberapa fungsi, antara lain:[19]

- a. Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan taman nasional.
- b. Pengelolaan kawasan taman nasional.
- c. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan kawasan taman nasional.
- d. Pengendalian kebakaran hutan.
- e. Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- f. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- g. Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan.
- h. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional.
- i. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kawasan TNGR juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan sumber daya



air di Pulau Lombok. Lereng-lereng Gunung Rinjani yang ditutupi oleh hutan berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang sangat penting bagi pasokan air bersih di pulau ini. Hal ini menjadikan TNGR tidak hanya penting dari segi ekologi, tetapi juga dari segi ekonomi dan sosial bagi masyarakat Lombok.[20] Masyarakat sendiri berperan aktif dalam konservasi dan pengelolaan pariwisata melalui koperasi yang mengelola kegiatan trekking. Pendapatan dari aktivitas pariwisata ini digunakan untuk konservasi, pelatihan, dan pemeliharaan jalur trekking, memastikan keberlanjutan ekosistem TNGR. Oleh karena itu, Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, nilai budaya yang penting, dan potensi wisata yang besar.

Pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaboratif menjadi kunci dalam menjaga kelestarian Kawasan. Pengelolaan berbasis ekowisata tentu menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh TNGR.

#### **Peranan *Destination Management Organization* (DMO) Sembalun di TNGR**

Berdasarkan penjabaran di atas, TNGR memiliki zonasi dan cakupan Kawasan yang sangat luas, di mana salah satu bagian kawasannya adalah Sembalun. Sembalun sendiri terletak di kaki Gunung Rinjani yang memiliki berbagai jenis destinasi dan atraksi pariwisata. Sembalun juga dikenal sebagai pintu atau gerbang utama dalam kegiatan pendakian Gunung Rinjani, yang merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia. Selain pendakian, Sembalun juga menawarkan berbagai daya tarik wisata lainnya. Salah satunya adalah perkebunan stroberi dan wisata alam lainnya. Selain itu, budaya dan tradisi masyarakat Sembalun juga menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan dapat menyaksikan berbagai upacara adat, tarian tradisional, dan kerajinan tangan yang unik. Desa ini memiliki beberapa rumah adat yang masih terjaga dengan baik, yang mencerminkan kekayaan budaya dan

sejarah Sembalun. Meskipun kondisi pariwisata di Sembalun yang menjadi bagian dari TNGR mengalami perkembangan yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Di mana dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata menjadi salah satu pilar ekonomi utama Sembalun. Namun, kurangnya perencanaan yang matang dan tata kelola yang efektif menyebabkan timbulnya masalah lingkungan dan sosial yang mendesak.[21]

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata di Sembalun adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Meskipun kawasan ini menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik dan mancanegara, infrastruktur dasar seperti sistem tata kelola air dan sampah masih belum memadai. Wisatawan sering kali menikmati keindahan alam, namun masyarakat setempat merasakan dampak negatif akibat kurangnya pengelolaan yang baik. Sistem distribusi air yang tidak memadai telah menyebabkan ketidakadilan lingkungan, di mana masyarakat harus membeli air sementara fasilitas pariwisata seperti hotel memiliki akses lebih baik.[21] Selain masalah infrastruktur, pengelolaan sampah juga menjadi isu penting yang perlu dijadikan perhatian. Di mana dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, volume sampah yang dihasilkan semakin besar. Namun, tidak ada sistem tata kelola sampah yang efektif. Sampah menumpuk, terutama pada akhir pekan, ketika wisatawan lokal datang dalam jumlah besar. Tingginya jejak ekologis wisatawan lokal dibandingkan dengan wisatawan internasional memperburuk situasi ini.[21] Kondisi ini pada akhirnya menciptakan ketegangan antara pariwisata dan lingkungan, yang jika tidak segera diatasi, dapat merusak daya tarik utama Sembalun sebagai destinasi wisata alam.[22]

Lebih lanjut dari sudut pandang sosial, telah muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dampak sosial dari pariwisata sering kali diabaikan, dan pembangunan pariwisata lebih berfokus pada



.....  
aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini diperburuk oleh pendekatan pembangunan yang cenderung top-down, tanpa konsultasi yang efektif dengan masyarakat. Proses partisipasi publik sering kali hanya formalitas, dan keputusan pembangunan dibuat berdasarkan asumsi-asumsi yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Paradigma lama dalam pengembangan pariwisata yang berfokus pada kuantitas kunjungan tanpa perencanaan jangka panjang menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Di Sembalun, tidak ada kajian daya dukung atau carrying capacity yang digunakan sebagai acuan untuk membatasi jumlah kunjungan wisatawan. Akibatnya, kawasan ini tertekan oleh arus wisatawan yang melebihi kapasitas lingkungan setempat.[21] Selain itu, konsep desa wisata yang diterapkan di Sembalun menciptakan destinasi-destinasi kecil di dalam satu destinasi besar, yang memperumit tata kelola secara keseluruhan, di mana setiap desa ingin menjadi destinasi tersendiri tanpa adanya koordinasi dan tata Kelola yang memadai.[22]

Kurangnya perencanaan terintegrasi juga menyebabkan ketimpangan antara pemasaran dan pengelolaan destinasi. Banyak upaya promosi dan pemasaran dilakukan untuk menarik wisatawan, namun sedikit perhatian diberikan pada aspek tata kelola destinasi itu sendiri. Kegiatan promosi yang intensif tanpa dibarengi dengan upaya pengelolaan yang baik hanya memperbesar tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur local. Di sisi lain, terdapat kesenjangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam hal tanggung jawab pengelolaan pariwisata. Kebijakan yang ada cenderung lebih fokus pada promosi pariwisata, sementara pengelolaan destinasi, termasuk aspek lingkungan dan sosial, sering kali terabaikan. Ini menciptakan kekosongan dalam pengelolaan, yang menyebabkan berbagai masalah seperti konflik sosial,

kerusakan lingkungan, dan ketidakseimbangan ekonomi.[21]

Berawal dari berbagai permasalahan di Sembalun tersebut, maka terbentuk *Destination Management Organization* (DMO) Sembalun merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang lahir dari kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola pariwisata di kawasan Sembalun. Awal mula pembentukannya dapat ditelusuri dari kesadaran dan kekhawatiran terhadap dampak pariwisata yang tidak terkendali tersebut. DMO Sembalun terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola pariwisata di kawasan Sembalun. Salah satu alasan utama terbentuknya DMO Sembalun adalah adanya kesenjangan dalam pengelolaan pariwisata yang menyebabkan distribusi keuntungan yang tidak merata di antara pelaku pariwisata lokal. Masyarakat setempat, termasuk perempuan, sering kali hanya menjadi penonton dalam kegiatan pariwisata yang dikelola oleh pihak luar. Selain itu, ketergantungan masyarakat pada pariwisata tanpa ada upaya pengelolaan yang berkelanjutan telah menimbulkan tekanan pada lingkungan alam, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlanjutan sektor tersebut.[21]

DMO Sembalun sendiri tidak secara langsung lahir dari satu lembaga, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai komunitas lokal. Salah satu yang berperan besar adalah komunitas perempuan yang tergabung dalam Sembalun Nina. Sembalun Nina pada awalnya fokus pada isu-isu lingkungan dan kesetaraan gender, dan dari situ berkembanglah gagasan untuk membentuk DMO sebagai lembaga yang lebih terstruktur dan terkoordinasi dalam mengelola pariwisata berbasis kawasan. Meskipun sering dikaitkan dengan organisasi lokal lain seperti Sembalun Nina, DMO Sembalun memiliki perbedaan mendasar dalam hal cakupan dan tujuan. Sembalun Nina, lebih fokus pada isu pemberdayaan perempuan dan ekofeminisme, sementara DMO Sembalun berfungsi sebagai





organisasi pengelola destinasi yang mencakup aspek yang lebih luas dari pengelolaan pariwisata secara keseluruhan. Namun, kedua organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan.[21] Oleh karena itu, DMO Sembalun menjadi DMO akar rumput pertama di Indonesia, yang berasal dari respon Masyarakat local terhadap kondisi yang terjadi saat ini serta antisipasi perkembangan Sembalun di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, dalam proses pendiriannya, DMO Sembalun mengalami banyak tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah wisatawan yang datang dan infrastruktur yang tersedia. Hal ini menyebabkan beban yang luar biasa pada sumber daya alam Sembalun. Air, yang merupakan salah satu sumber daya penting, sering kali tidak tersedia untuk masyarakat karena dialokasikan untuk hotel-hotel dan tempat wisata besar. Masyarakat setempat mulai merasakan ketidakadilan ini, dan banyak yang mengungkapkan kekhawatiran mereka melalui forum-forum lokal.[21] Pendirian DMO Sembalun adalah hasil dari berbagai audiensi dan konsultasi publik, termasuk pertemuan dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Salah satu momen penting dalam pembentukan DMO ini adalah ketika Bupati Lombok Timur menyetujui untuk memberikan dukungan berupa Surat Keputusan (SK) pembentukan DMO yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2021, yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 40 tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kelola Destinasi Sembalun (DMO Sembalun).[22] Proses ini melibatkan beberapa tahap, termasuk audiensi dengan Komisi IV DPRD Lotim dan pertemuan dengan pemerintah provinsi. Dalam beberapa pertemuan tersebut, masyarakat setempat menunjukkan data dan fakta mengenai dampak negatif dari pengelolaan pariwisata yang tidak terkoordinasi dengan baik.[22]

Proses konsultasi publik ini juga mempertemukan berbagai elemen masyarakat,

mulai dari tokoh-tokoh perempuan, pemuda, hingga para pelaku usaha lokal. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa DMO harus menjadi wadah untuk menyatukan semua pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata Sembalun. Hal ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan.[22] Setelah berbagai tahapan diskusi dan forum, DMO Sembalun akhirnya resmi berdiri dengan legalitas yang kuat melalui Peraturan Bupati Lombok Timur.[21] Keberadaan DMO ini diharapkan menjadi solusi bagi masalah-masalah lintas batas yang sebelumnya tidak dapat diatasi secara efektif oleh pemerintah setempat. Di mana dalam hal ini, DMO Sembalun mengambil peran sebagai lembaga moderasi dan sinkronisasi yang bekerja untuk memastikan bahwa pariwisata tidak hanya bermanfaat bagi wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.

Adapun tujuan dibentuknya DMO Sembalun sebagai berikut:[22]

- a. Menjadikan Sembalun sebagai destinasi dengan pengelolaan berkelanjutan terbaik di NTB
- b. Mendesain strategi pengembangan untuk mengoptimalkan multiplier efek ekonomi, sosial dan lingkungan
- c. Meningkatkan lama tinggal, belanja dan kunjungan Kembali wisatawan dengan menciptakan atraksi berbasis edukasi dan pengalaman.

Lebih lanjut dalam mencapai tujuan tersebut, DMO Sembalun memiliki beberapa prinsip kerja yang kemudian digunakan dalam setiap program kerja dan kegiatannya. Adapun prinsip kerja DMO Sembalun sebagai berikut:[22]

- a. **Partisipatif.** Memastikan keterlibatan dan keterwakilan *pentahelix* Pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam setiap proses pelaksanaan fungsi manajemen.



- b. **Berkelanjutan.** Layak ekonomi (*economically feasible*), daya dukung lingkungan (*environmentally viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan tepat guna secara teknologi (*technologically appropriate*).
- c. **Kolaboratif.** Membangun jejaring yang kuat dengan setiap elemen *pentahelix* pembangunan pariwisata untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, peran serta para pihak.
- d. **Ilmiah.** Pariwisata adalah isu lintas batas sehingga tata Kelola harus menggunakan pendekatan Kawasan atau Kapaeran.
- e. **Keterpaduan.** Membangun jejaring yang kuat dengan setiap elemen *pentahelix*.
- f. **Gender.**

Konsep pengelolaan pariwisata yang diusung oleh DMO Sembalun mengedepankan pentingnya sinergi antara berbagai elemen, termasuk pemerintah, masyarakat, pelaku industri pariwisata, dan akademisi.[21] Kolaborasi ini diwujudkan melalui penyusunan program-program yang memperhatikan potensi dan keterbatasan kawasan Sembalun. DMO Sembalun juga berfokus pada isu-isu penting lainnya, seperti pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan sistem pengelolaan air yang adil. Isu-isu ini menjadi prioritas karena sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Sembalun. Selain itu, DMO juga berupaya memperbaiki regulasi terkait pariwisata, dengan tujuan agar kebijakan-kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal serta menjaga keberlanjutan lingkungan.[22]

Lebih lanjut, peranan DMO dalam pengembangan pariwisata di Sembalun dapat terlihat dari berbagai program kerja DMO. Di mana program kerja DMO Sembalun berbasis pada “*Sembalun Ecosystem Concept*” yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan

yang dihadapi Sembalun sebagai destinasi wisata. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa pengelolaan destinasi wisata perlu melibatkan lebih dari sekadar peningkatan jumlah wisatawan.[21] Sembalun Ecosystem Concept berusaha memadukan kebutuhan ekologi, sosial, dan ekonomi agar pariwisata dapat menjadi alat pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya memperhatikan keberlanjutan alam tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Hal ini terlihat dari pendekatan partisipatif yang diterapkan sejak awal pembentukan DMO, termasuk melibatkan masyarakat setempat dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Proses ini menciptakan kerangka tata kelola berbasis kawasan yang memungkinkan kolaborasi antar desa di wilayah Sembalun, sehingga pengelolaan destinasi tidak terpecah-pecah.

Salah satu pilar utama dari *Sembalun Ecosystem Concept* adalah memperkuat ketahanan masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan yang matang. Hal ini tercermin dalam upaya untuk memperbaiki tata kelola sumber daya air dan sistem pengelolaan sampah yang adil. Pengelolaan air yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan lingkungan dipandang sebagai sumber ketidakadilan. Oleh karena itu, DMO mendorong pembangunan sistem distribusi air yang lebih berkelanjutan dan merata. Selain isu air, DMO juga berfokus pada masalah sampah, terutama dengan meningkatnya kunjungan wisatawan lokal yang menghasilkan lebih banyak limbah dibandingkan dengan wisatawan internasional. Hal ini mendorong DMO untuk menginisiasi berbagai program edukasi terkait pengelolaan sampah, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Edukasi ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah berbasis kawasan yang efektif.[21]

*Sembalun Ecosystem Concept* juga menekankan pentingnya memperhatikan daya dukung lingkungan dalam setiap aspek



pengembangan pariwisata. Misalnya, konsep ini mempromosikan kajian mendalam tentang *carrying capacity* atau daya dukung alam dalam menerima kunjungan wisatawan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut akibat pariwisata massal yang tidak terkelola dengan baik. DMO Sembalun memahami bahwa untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan, pengelolaan tidak hanya terfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas pengalaman wisatawan. Program kerja berbasis *Sembalun Ecosystem Concept* juga berusaha untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan pariwisata. Salah satu wujudnya adalah pembuatan aturan adat atau *awiq-awiq* yang mengatur interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, termasuk larangan-larangan yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan lingkungan. *Sembalun Ecosystem Concept* juga melihat pentingnya diversifikasi ekonomi sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada pariwisata.[21]

Program kerja DMO Sembalun dirancang dengan tujuan utama untuk menciptakan tata kelola destinasi yang berkelanjutan dan efektif, terutama dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata di kawasan Sembalun. Salah satu program utama DMO Sembalun adalah pengelolaan air bersih melalui pembentukan PAMDes (Perusahaan Air Minum Desa) yang bertujuan untuk memastikan distribusi air yang adil dan berkelanjutan di seluruh kawasan. Selain itu, pengelolaan sampah merupakan program kerja DMO Sembalun yang sangat signifikan, mengingat dampak pariwisata terhadap peningkatan volume sampah di kawasan ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, DMO Sembalun menginisiasi pembangunan sistem tata kelola sampah yang berbasis kawasan, yang melibatkan semua desa di Sembalun. Pengelolaan sampah berbasis kawasan ini dirancang untuk memastikan bahwa

penanganan sampah dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi di setiap desa, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan.[21] Selain itu, DMO Sembalun juga memiliki beberapa indikator kinerja program, antara lain:[22]

- a. Manajemen yang kompeten, jujur dan Ikhlas dalam bekerja
- b. Jejaring yang luas dan kuat
- c. Data dan kajian sebagai dasar dalam membangun stratgei
- d. Terbentuknya RDTR sebagai peta pengembangan pariwisata
- e. Terbangunnya regulasi berbasis partisipasi dan kesepakatan bersama
- f. Terbentuknya system tata Kelola air yang berkeadilan
- g. Terbangunnya system tata Kelola sampah pariwisata yang berkelanjutan
- h. Meningkatnya jumlah atraksi berbasis edukasi dan pengalaman
- i. Meningkatnya lama tinggal wisatawan
- j. Meningkatnya belanja wisatawan
- k. Pemerataan sebaran kunjungan secara geografis dan musim kunjungan
- l. Meningkatnya kunjungan Kembali wisatawan
- m. Meningkatnya manfaat pariwisata bagi Masyarakat local
- n. Meningkatnya manfaat pariwisata bagi lingkungan.

Di dalam menjalankan Program kerjanya, DMO Sembalun memiliki beberapa program kerja yang terbagi ke dalam beberapa divisi, antara lain Divisi Humas & Sumber Daya Manusia, Divisi Lingkungan, Divisi Ekonomi, Divisi Sosial Budaya & Religi, Divisi Kastrat & Hukum, dan Divisi Media.[22] Adapun penjabaran program kerja pada setiap divisi sebagai berikut:[22]



- a. Divisi Humas & Sumber Daya Manusia
  - 1) *Capacity Building*
  - 2) Edukasi Wisatawan
  - 3) *Branding Sembalun Quality Tourism*
  - 4) *Magang & Voluntourism*
  - 5) Sembalun Kampung Inggris
- b. Divisi Lingkungan
  - 1) Pengembangan Atraksi Berbasis Kearifan Lokal
  - 2) Edukasi Wisatawan
  - 3) Rehabilitasi Sumber Air Berbasis Kearifan Lokal
  - 4) Pusat Konservasi DMO
  - 5) Pemeliharaan Estetika Destinasi
- c. Divisi Ekonomi
  - 1) Pendataan
  - 2) Pembentukan *Local Working Group*
  - 3) Market Hub Produk Unggulan
  - 4) Jebak Desa
  - 5) Satu Desa Satu Produk
- d. Divisi Sosial Budaya & Religi
  - 1) Integrasi Pariwisata di Paer Sembalun
  - 2) Inventarisasi dan Interpretasi Budaya
  - 3) MTQ Desa
  - 4) Konservasi Budaya
  - 5) Satu Desa Satu Produk
- e. Divisi Kastrat & Hukum
  - 1) Kajian Kepariwisata Paer Sembalun
  - 2) Regulasi Pariwisata Paer Sembalun
  - 3) Jejaring Menuju Sembalun *Quality Tourism*
  - 4) Mitigasi *Hazard* Pariwisata
- f. Divisi Media
  - 1) DMO Mainstreaming
  - 2) Digitalisasi Kepariwisata Paer Sembalun
  - 3) Diseminasi Informasi Atraksi

Berdasarkan program kerja tersebut, DMO Sembalun telah menetapkan beberapa Sasaran Program yang terbagi menjadi Profesionalisme, Membangun Pondasi yang Kuat serta tercapainya *Sembalun Quality Tourism*. Adapun penjabaran sasaran program DMO Sembalun sebagai berikut:[22]

- a. Profesionalisme
  - 1) Jejaring yang luas dan kuat
  - 2) Data dan kajian sebagai dasar dalam membangun strategi
  - 3) Manajemen yang kompeten dan profesional
- b. Membangun Fondasi yang Kuat bagi Industri Pariwisata
  - 1) Terbentuknya RDTR sebagai peta pengembangan pariwisata
  - 2) Terbangunnya regulasi berbasis partisipasi dan kesepakatan bersama
  - 3) Terbentuknya system tata Kelola air yang berkeadilan
  - 4) Terbangunnya system tata Kelola sampah pariwisata yang berkelanjutan
- c. Menuju Sembalun *Quality Tourism*
  - 1) Meningkatkan jumlah atraksi berbasis edukasi dan pengalaman
  - 2) Meningkatkan lama tinggal wisatawan
  - 3) Meningkatkan sebaran kunjungan secara geografis dan musim kunjungan
  - 4) Meningkatkan kunjungan Kembali wisatawan
  - 5) Meningkatkan manfaat pariwisata bagi Masyarakat local
  - 6) Meningkatkan manfaat pariwisata bagi lingkungan.

Oleh karena itu, DMO Sembalun pada akhirnya memainkan peran yang sangat signifikan di Sembalun dan Kawasan TNGR. Salah satu peran utama DMO Sembalun di



TNGR adalah mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk menciptakan strategi pengelolaan yang sinergis. DMO Sembalun berperan dalam mempertemukan kebijakan pembangunan pariwisata nasional dengan kapasitas lokal, khususnya di kawasan TNGR yang merupakan destinasi wisata alam dengan daya tarik utama berupa keindahan alam Gunung Rinjani. DMO Sembalun juga fokus pada aspek keberlanjutan lingkungan. Mereka telah menginisiasi berbagai program pengelolaan air dan sampah berbasis komunitas di kawasan TNGR.[21] Akhirnya, DMO Sembalun terus memantau dan mengevaluasi setiap program yang mereka jalankan, dengan menekankan pentingnya keberlanjutan dan keterpaduan dalam setiap aspek pengelolaan TNGR. Mereka memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun pihak lain, sejalan dengan visi dan misi mereka untuk menjadikan TNGR sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

DMO Sembalun pada akhirnya memiliki peranan yang vital sebagai katalisator dalam mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan utamanya adalah memastikan pembangunan pariwisata tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya setempat. DMO Sembalun sendiri memiliki keunikan dibandingkan dengan DMO lain di Indonesia, karena dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat lokal dan menjadi DMO pertama di Indonesia yang berasal dari grassroot. Keberadaan DMO yang berorientasi pada pengembangan pariwisata berbasis komunitas ini memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola destinasi. Hal ini menunjukkan bahwa DMO Sembalun berhasil

mempromosikan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat. Peranan DMO Sembalun tersebut dapat terlihat dari berbagai program kerja yang dilaksanakan di Kawasan TNGR, khususnya Sembalun.

Meski demikian, peran DMO yang signifikan tersebut, kawasan TNGR tetap menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Pertumbuhan pariwisata yang pesat menimbulkan risiko terhadap kerusakan lingkungan dan tekanan sosial budaya. Oleh karena itu, DMO Sembalun melakukan pendekatan tata kelola yang komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta agar kelestarian destinasi tetap terjaga. Strategi utama yang diterapkan oleh DMO mencakup penyadaran kolektif, pembentukan kelembagaan, dan penguatan jejaring antar-pemangku kepentingan. Strategi ini tidak hanya berfokus pada kelestarian lingkungan, tetapi juga pada pengembangan kapasitas masyarakat lokal untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengelolaan pariwisata. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, serta dalam menjaga keberlanjutan pariwisata di TNGR, khususnya di Sembalun.

Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program kerja dan peranan DMO Sembalun. Melalui dialog yang intensif dan partisipasi aktif dari semua pihak, DMO berhasil merumuskan kebijakan strategis yang mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tetap mengedepankan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa DMO memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan di TNGR, khususnya di Sembalun. Keberhasilan DMO Sembalun dalam mengkoordinasikan berbagai



..... pemangku kepentingan membuktikan bahwa pendekatan tata kelola yang kolaboratif dapat menghasilkan dampak positif bagi destinasi wisata. Namun, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya lokal.

#### Saran

Kedepannya diharapkan akademisi dapat memperkuat kolaborasi dengan DMO dan pemerintah dalam hal penelitian terapan. Akademisi dapat melakukan kajian ilmiah yang mendalam mengenai dampak pariwisata terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi lokal. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi yang lebih erat antara akademisi dan DMO akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berdasarkan data empiris, relevan dengan konteks lokal, serta memperhatikan potensi dan tantangan yang ada di TNGR. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan DMO dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah dapat menyediakan regulasi yang lebih tegas terkait pelestarian lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong sinergi antara sektor publik, swasta, dan akademisi untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dalam mengembangkan strategi pariwisata yang berkelanjutan.

Kedepannya, seluruh pihak baik akademisi, pemerintah maupun DMO perlu berfokus pada pembangunan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan. Akademisi dapat berperan dalam memberikan pelatihan terkait manajemen pariwisata berkelanjutan, sementara pemerintah dan DMO menyediakan platform untuk mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut di lapangan. Dengan demikian,

kolaborasi yang efektif akan tercipta, memperkuat kemampuan para pelaku pariwisata lokal untuk menjalankan praktik pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Pechlaner, D. Zacher, C. Eckert, and L. Petersik, "Joint responsibility and understanding of resilience from a DMO perspective – an analysis of different situations in Bavarian tourism destinations," *Int. J. Tour. Cities*, vol. 5, no. 2, pp. 146–168, 2019, doi: 10.1108/IJTC-12-2017-0093.
- [2] A. W. H. Fasa, M. Berliandaldo, and D. Andriani, "Implikasi Peran Destination Management Organization (DMO) – Destination Governance (DG) dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan," *J. Kepariwisata*, vol. 21, no. 2, pp. 113–129, 2022, doi: 10.52352/jpar.v21i2.845.
- [3] J. Estêvão, M. J. Carneiro, and L. Teixeira, "Destination management systems' adoption and management model: proposal of a framework," *J. Organ. Comput. Electron. Commer.*, vol. 30, no. 2, pp. 89–110, 2020, doi: 10.1080/10919392.2020.1724765.
- [4] U. Wagenseil, M. Wyss, and L. Huck, "The Case of Sustainable Tourism Development in Alpine Destinations: Importance, Implementation, and the Role of the Local DMO," *Tour. Plan. Dev.*, pp. 1–23, 2022, doi: 10.1080/21568316.2022.2107561.
- [5] Universitas Kristen Satya Wacana, "DMO Diharapkan Mampu Majukan Industri Pariwisata Indonesia," *Universitas Kristen Satya Wacana*, 2022.  
[https://www.uksw.edu/detail\\_post/news/dmo-diharapkan-mampu-majukan-industri-pariwisata-indonesia](https://www.uksw.edu/detail_post/news/dmo-diharapkan-mampu-majukan-industri-pariwisata-indonesia) (accessed Nov. 12, 2022).
- [6] UNWTO, "POLICY AND



- DESTINATION MANAGEMENT,” *United Nation World Tourism Organization*, 2018. <https://www.unwto.org/policy-destination-management> (accessed Nov. 12, 2022).
- [7] P. B. Putera, S. Mulatsih, and S. Rahayu, “Destination Management Organization (DMO): Paradigma Baru Pengelolaan Pariwisata Daerah Berbasis Teknologi Informasi,” *J. Kepariwisata Indonesia*, vol. 9, 2014.
- [8] V. Roblek, D. Drpić, M. Meško, and V. Milojica, “Evolution of sustainable tourism concepts,” *Sustain. MDPI*, vol. 13, no. 22, pp. 1–21, 2021, doi: 10.3390/su132212829.
- [9] A. Y. Permana, I. Susanti, and K. Wijaya, “Architectural Tourism Development Model as Sustainable Tourism Concept in Bandung,” *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 409, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1755-1315/409/1/012005.
- [10] S. khoshnevis Yazdi, “Sustainable Tourism,” *Am. Int. J. Soc. Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 50–55, 2012.
- [11] I. A. P. Widiati and I. Permatasari, “Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung,” *Kertha Wicaksana*, vol. 16, no. 1, pp. 35–44, 2022, doi: 10.22225/kw.16.1.2022.35-44.
- [12] R. K. Yin, *Applications of Case Study Research (Applied Social Research Methods)*. New York: SAGE Publications, Inc., 2013.
- [13] P. Schwartz-Shea and D. Yanow, *Interpretive Research Design: Concepts and Processes, Interpretive Research Design: Concepts and Processes*, 1st ed. Routledge, 2012.
- [14] Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Executive Summary: Kajian Rapid Assessment Destination Management Organization - Destination Governance (DMO-DG),” Yogyakarta, 2021.
- [15] S. Bhudiharty, “Studi Komparatif: Penerapan Program Destination Management Organization (DMO) Kementerian Pariwisata Pada Destinasi Wisata Kota Tua Jakarta,” *J. Ind. Pariwisata*, vol. 3, no. 1, pp. 23–35, 2020, doi: 10.36441/pariwisata.v3i1.42.
- [16] Taman Nasional Gunung Rinjani, “Sejarah Taman Nasional Rinjani,” *Taman Nasional Gunung Rinjani*, 2024. <https://www.rinjaninationalpark.id/sejarah-tngr> (accessed Jul. 08, 2024).
- [17] M. Mansur, “Struktur dan Komposisi Jenis-Jenis Pohon di Taman Nasional Gunung Rinjani bagian Selatan, Lombok, Nusa Tenggara Barat ( Structure and Composition Tree Species in Southern of Rinjani Mountain National Park, Lombok, West Nusa Tenggara ),” *J. Biol. Indones.*, vol. 12, no. 1, pp. 87–98, 2016.
- [18] P. N. Sadikin, S. Mulatsih, B. P. Noorachmat, and H. S. Arifin, “Analisis Status Keberlanjutan Ekowisata,” *J. Anal. Kebijak. Kehutan.*, vol. 17, no. 1, pp. 33–51, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2020.17.1.33-51>.
- [19] Taman Nasional Gunung Rinjani, “Tugas dan Fungsi Taman Nasional Gunung Rinjani,” *Taman Nasional Gunung Rinjani*, 2024. <https://www.rinjaninationalpark.id/profil-tngr> (accessed Jul. 08, 2024).
- [20] Mutiara Lombok, “Taman Nasional Gunung Rinjani,” *Marlion LLC*, 2024. <https://marlionllc.com/taman-nasional-gunung-rinjani-2/>.
- [21] “Wawancara dengan Ibu Baiq Sri Mulya, SE., M.Sc, Direktur Utama DMO Sembalun, pada 27 Juli 2024,”



- 
- 2024.
- [22] Destination Management Organization Sembalun, “Profil & Rencana Aksi 2021 Destination Management Organization Sembalun (Organisasi Tata Kelola Destinasi Sembalun),” Sembalun, Lombok Timur, 2021.